

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Jurnal Pertama, berjudul Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di DKI Jakarta. Oleh Roy Morado. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Volume 3, No. 2, Desember Tahun 2021. ISSN : 2685-3582. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, buku-buku referensi dan sejenis hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh landasan teori atas masalah yang akan diteliti. Penelitian ini mempelajari teori Mazmanian & Sabatier. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di DKI Jakarta bahwa implementasi penyaluran bantuan sosial Covid19, dapat dikatakan cukup untuk beberapa aspek namun terdapat kekurangan pada aspek lainnya. Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial sudah membantu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat rentan walaupun belum mampu untuk mengcover secara keseluruhan. Proses dari implementasi program

bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat rentan pada kementerian sosial sendiri senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Yang dimana faktor pendukung dalam pelaksanaannya program bantuan sosial ini meliputi integrasi antar pelaksana, banyaknya dukungan publik, sikap/komitmen dari aparat pelaksana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat rentan pada Kementerian Sosial adalah simpang siurnya data penerima manfaat serta kualitas bahan sembako yang kurang baik sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah.

Jurnal Kedua, berjudul, Analisis Pengaruh Pemberian Bansos Covid-19 Terhadap Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Rank Order Centroid. Oleh Agung Setiawan Hulu, Muhardi Saputra, Jhonly Marihot Hasudungan Sinambela, Siti Aisyah, Palma Juanta. Jurnal InfoSys. Volume 6, No. 1, Agustus Tahun 2021, halaman 22-31. ISSN : 2087-3085. Penelitian ini bertujuan untuk membantu perekonomian Rakyat Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi covid-19. Semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai kriteria akan mendapatkan bantuan sosial. Metode yang digunakan Metode ROC (Rank Order Centroid) dipilih peneliti untuk menganalisis kriteria sehingga didapat penentuan warga yang layak mendapat bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Penerima bantuan sosial covid-19 pada Desa Ujung Sedang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang memerlukan analisis pengelolaan data agar penentuan penerima bantuan sosial dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat, Metode rank order centroid (ROC) merupakan metode terbaru dari semesta Sistem Pendukung Keputusan yang dapat menjawab kesulitan dalam pengelolaan kriteria penerima bantuan sosial Covid-19 Desa Ujung Sedang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sehingga tercapai pengidentifikasian dengan

tepat, Warga B memiliki nilai tertinggi sehingga menjadi kandidat paling utama mendapatkan bantuan sosial Covid-19.

Jurnal Ketiga, berjudul Implementasi Paket Bantuan Sosial Sebagai Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19. Oleh Aldi Budi Riyanta, Heru Nurcahyo, Joko Santoso. Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat. Volume 1, No. 2. E-ISSN : 2722-5097 halaman : 82-86. Penelitian ini bertujuan memberikan upah harian lepas dengan memberikan paket bantuan langsung berupa sembako, handsanitizer, masker dan sejumlah uang. Metode yang digunakan berupa metode pengabdian yang dimana diadakannya sosialisasi program melalui kegiatan penyuluhan dan pemberian paket bantuan di kampus Politeknik Harapan Bersama dan wilayah sekitar kota Tegal. Tahapan pelaksanaan pengabdian ini meliputi : (a). Observasi sebagai tahapan awal, dilakukan untuk menganalisis masalah yang tengah dihadapi oleh calon penerima bantuan dengan metode bertanya pada tetangga dan survey ke RT setempat selain itu dilakukan juga survey jumlah calon penerima bantuan disekitar jalan Kapten Sudibyo, Jalan AR. Hakim dan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tegal yang sasarannya penarik becak dan pemulung. Kegiatan ini dibantu sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Prodi DIII Farmasi sebagai observator. (b). Persiapan program bantuan meliputi rencana kegiatan yang telah disepakati dan metode pemberian bantuan, dan perlengkapan yang diperlukan seperti kendaraan pengangkut paket bantuan. (c). Dilakukan rapat untuk memantapkan kegiatan. (d). Pelaksanaan kegiatan utama. Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dengan ditandai dengan terdistribusinya seluruh paket bantuan sembako kepada masyarakat yang sesuai sasaran. Selain itu masyarakat juga diberi edukasi pencegahan Covid 19, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Jurnal Keempat, berjudul Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan. Oleh Rut Royanti Sianturi, Beby Masitho Batubara, & Nina Angelia. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik. ISSN 2550-1305 (Online). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan dari hasil Implementasi program sembako pada masa pandemi covid-19 di kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan belum berjalan dengan efektif dan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 1) Komunikasi, belum berjalan dengan efektif karena data penerima tidak relevan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat membuat komunikasi antara implementor dengan sasaran kurang berjalan dengan baik. 2) Sumber daya, sumber daya finansialnya belum memadai, Jumlah KPM yang mengalami perubahan dikarenakan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, mengenai sumber daya manusia pada tempat pengambilan sembako belum memadai karena Agen BRI Link hanya beranggotakan 5 orang. 3) Disposisi, tidak ditemukan implementor yang keluar dari jalurnya, para implementor komitmen, jujur dan demokratis dalam menjalankan pekerjaannya. 4) Struktur Birokrasi, Semua pihak telah mengikuti Standar Operasional Prosedur, pada masa pandemi semua tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Hambatan dalam implementasi program sembako pada masa pandemi covid-19 di kelurahan Sei Sikambing B Kota Medan yaitu ketidaktepatan sasaran seperti sudah mampu secara ekonomi, ketidakkonsistenan jadwal penyaluran, adanya permasalahan kartu rusak, adanya penolakan pendataan/verifikasi dari masyarakat, adanya penerima bantuan yang pindah alamat dan sudah meninggal.

Jurnal Kelima, berjudul Tinjauan Konstitualitas dan Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19. Oleh Lefri Mikhael, Riandini Yosandra Ira Nursanty, Mochamad Rifqi Hananto. ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216. Penelitian ini bertujuan untuk menjamin standar kehidupan yang sejahtera termasuk didalamnya sandang, pangan, dan papan serta perbaikan kondisi kehidupan layak di masa pandemi adalah melalui program Bantuan Sosial Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa implementasi Bantuan Sosial Covid-19 dapat dikatakan cukup berhasil mengingat manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Koordinasi baik yang terjalin antara Kemensos dengan pilar sosial menjadi kekuatan implementasi kebijakan ini. Selain itu, regulasi dan anggaran yang menopangnya juga terbilang kuat sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang perlu dibenahi dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 adalah pengakurasian kembali data penerima, pembenahan koordinasi antar lembaga pemerintah khususnya jajaran pemerintah pusat, dan peningkatan pengawasan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19.

Jurnal Keenam, berjudul Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Baru). Oleh Mariama Qamariah, Afifuddin, Suyeno. Jurnal Respon Publik. Volume 14, No. 4, Tahun 2020. ISSN : 2302-8432. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lanjut usia terlantar di Dinas Sosial Kota Batu juga mengetahui faktor pendukung dari pelaksanaan program bantuan sosial juga faktor yang menjadi kendala, dimana dalam pelaksanaan implementasi program bantuan sosial tersebut terdapat kendala- kendala yang terjadi sehingga pihak

Dinas Sosial juga harus memiliki solusi dalam menghadapi kendala yang timbul dalam pengimplementasian program bantuan sosial tersebut. Metode penelitian penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu dapat dikatakan sudah cukup baik. Perlindungan sosial

dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh dinas sosial kota Batu sudah membantu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia terlantar yang berada di Kota Batu walaupun belum mampu untuk mengcover secara keseluruhan. Hal tersebut sebagaimana diukur dengan indikator yang digunakan dalam proses pengimplementasian baik dari karakteristik masalah, kebijakan maupun karakteristik lingkungan. Yang dimana masing-masing indikator ini menunjukkan sebagian besar sudah sesuai dengan sasaran kebijakan dari bantuan sosial ini.

Jurnal Ketujuh, berjudul Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid-19 Kampung Parigi RW 005. Oleh Agustina Mogi, Rahayu, Sanjaya, Nurmono, Sulistiyani. Volume 2 No. 1 Oktober Tahun 2020, ISSN (*online*) : 2686-5858, ISSN (*Print*) : 2686-1712. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya berupa persediaan bahan pangan dan tidak adanya pemasukan yang biasa mereka peroleh saat bekerja. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh harian, akibat PSBB ini tentunya mereka tidak dapat bekerja dan tidak memperoleh penghasilan. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini diantaranya, pengumpulan data warga terdampak Covid-19, sosialisasi bantuan sosial berupa penyuluhan dan konseling terkait pengelolaan dana keuangan warga dalam menghadapi pandemik akibat wabah Covid-19. Dari jurnal yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 5 s.d. 7 Mei 2020 berlokasi di kampung Parigi RW 005, Pondok Aren Tangerang Selatan, PKM diselenggarakan. Untuk menghindari kerumunan warga maka bantuan diberikan dari pintu ke pintu kepada keluarga yang telah ditentukan untuk mendapatkan bantuan. Kegiatan pembagian dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat yaitu semua tim yang terlibat menggunakan masker penutup wajah, pencuci tangan dan jaga jarak.

Jurnal Kedelapan, berjudul Bantuan Sosial Bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi. Oleh Sari Handayani. *Journal of Social Development Studies*. Volume 1, September 2020, hal: 61-65 . ISSN (*Print*): 2721-3870, ISSN (*Online*): 2721-3889. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dalam pemberian bantuan sosial bagi lansia. Data penelitian didapatkan dari open source sejak bulan Maret hingga Juli 2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan data yang bersumber dari Nadan Pusat Statistik (BPS) terkait Lansia di Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta menyediakan poster himbauan untuk menjaga lansia agar terhindar dari COVID-19. Melalui poster digital tersebut Pemerintah DKI Jakarta menunjukkan adanya kepedulian khusus kepada lansia sebagai salah satu kelompok rentan (Pemerintah DKI Jakarta, 2020c). Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggalakkan kembali Gerakan Sayangi Lansia (GSL) yang bertujuan agar lansia mendapatkan akses edukasi dan pendampingan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan new normal (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020c)

Jurnal Kesembilan, berjudul Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakata Kabupaten Buleleng oleh Nyoman Omy Anggreni dan Nyoman Subanda, Volumen 4 No. 2 Tahun 2020, ISSN : 2621-5306. Penelitian ini bertujuan untuk pemberian Bantuan Sosial untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional di Kabupaten Buleleng. indikator orang-orang yang mendapatkan dana bantuan ialah berupa penanggulangan bencana alam, kecelakaan sesaat, anak terlantar atau anak jalanan dan fakir miskin. Dalam penyampaian

bantuan tersebut kita harus mendata semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Pengambilan subyek penelitian menggunakan teknik purposive, dengan teknik pengumpulan data menggunakan lembar wawancara. Data diperoleh dari wawancara mendalam yang terdiri dari pelaksana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan Kabupaten Buleleng, bersumber dari Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dari jurnal yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng tahun 2019, jaminan yang dimaksud ini merupakan jamin sosial bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan terlantar agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya (Basic Living Needs) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah Pusat dan atau Daerah.

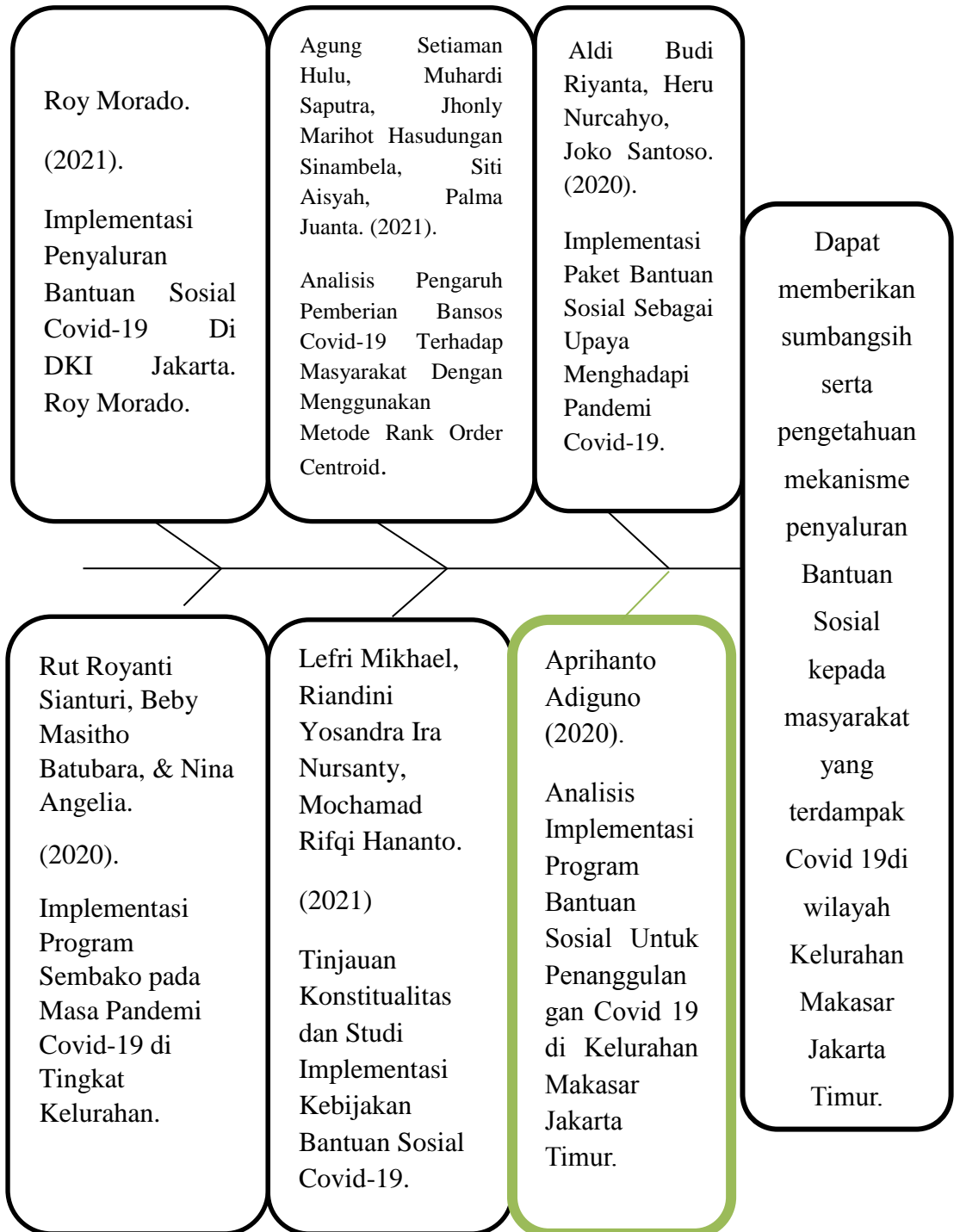
Jurnal Kesepuluh, berjudul Implementasi Penerimaan Bantuan Sosial Bagi Kaum Miskin Di Halmahera Utara. Oleh Saiful Deni, Aji. Jurnal DInamika Sosial dan Budaya. Volume 1, No.1 2015. ISSN : 2460-3511. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, terutama masyarakat miskin, terlantar dan kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989:1). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih ada banyak orang miskin menurunkan pendidikannya, berpenghasilan rendah, rendah kemampuan daya beli sekaligus kebutuhan hidup

rendah dalam kemampuan membiayai diri sendiri dan keluarga saat berada dirawat di Rumah Sakit.

Terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas perbedaan tersebut diantaranya, pertama, lokus penelitian yang dilakukan di Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar Jakarta Timur untuk memenuhi pendataan ilmiah, Kedua, permasalahan yang diangkat terkait Implementasi kebijakan Bantuan Sosial untuk tenaga pendidik dan kependidikan di masa pandemi Covid-19, Ketiga, dalam penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya di bidang Kebijakan Publik dalam hal Implementasi Kebijakan.

2.2 Diagram Fishbond

Gambar 2.1 Diagram Fishbond



2.3 Kebijakan Publik

Menurut Bambang (2017:17) kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Kebijakan publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan, baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun adanya informasi yang berubah. Perubahan kebijakan publik dilakukan setelah adanya evaluasi. Perubahan dalam kebijakan publik dengan demikian adalah dinamis mengikuti perubahan lingkungan diluar maupun dari dalam organisasi publik.

Menurut Anderson (1984: 113) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah dapat mengklasifikasikan kebijakan yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan substantif itu harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan ataupun perorangan pada jabatan pemerintah pusat maupun dipemerintah daerah.

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Secaram istilah kebijakan juga digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan. Pengertian kebijakan dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, namun kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Wahab (2014: 133) mengatakan bahwa istilah implementasi berasal dari Bahasa Inggris “to implement” (mengimplementasikan). Dalam konteks ini, Wahab merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau keputusan presiden.

Sedangkan Makmur dan Thahier memberikan definisi implementasi kebijakan publik sebagai suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan.

Nugroho (2017:127), menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing – leading - controlling. Kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dalam model manajemen dapat disusun melalui:

1. Implementasi strategi
2. Pengorganisasian
3. Penggerakan dan kepemimpinan
4. Pengendalian

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan untuk kehidupan masyarakat atau publik lahir tidak semudah membalikkan telapak tangan karena akan ada suatu proses kebijakan yang akan dijalankan pemerintah yaitu perumusan kebijakan untuk dapat suatu produk hukum dan akan digunakan kepada masyarakat. Namun dalam realita kehidupan bermasyarakat proses kebijakan sering kali dilakukan 28 dalam proses kegiatan yang bersifat politis karena proses kebijakan melibatkan aktor pemerintah.

Menurut Anggara (2014: 35) istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*, kata *policy* sendiri ada yang mendefinisikan menjadi “kebijakan” dan ada yang mendefinisikan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Dye seperti yang dikutip Anggara (2014: 35) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*). Berdasarkan pernyataan Dye, ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan karena kebijakan publik merupakan salah satu tindakan pemerintah.

Menurut Mustopadidjaja (1992: 30) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan David Easton dalam Toha (1991: 60), merumuskan sebagai berikut : “*The authoritative allocation of value the whole society but it turns out that only government can authoritatively act on the whole society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values*” dalam artian bahwa kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut.

Kebijakan untuk kehidupan masyarakat atau publik lahir tidak semudah membalikkan telapak tangan karena akan ada suatu proses kebijakan yang akan dijalankan pemerintah yaitu perumusan kebijakan untuk dapat menjadi suatu produk hukum dan akan digunakan kepada masyarakat. Namun dalam realita kehidupan bermasyarakat proses kebijakan sering kali dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis karena proses kebijakan melibatkan aktor pemerintah.

Aktivitas politis tersebut hanya nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring atau implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan merupakan proses kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003: 132) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang sifatnya interaktif maka tidak bisa terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasinya. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan atau program tidak sederhana akan tetapi masih dihadapkan pada berbagai kesukaran seperti teknis, perilaku kelompok sasaran, kejelasan alokasi sumber daya, koordinasi, kondisi ekonomi, politik dan sosial. Berbagai kesukaran yang dihadapi tersebut menjadikan penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan mengakibatkan program tidak terlaksana dengan baik. Hoogerwerf (1983) dalam Tjilen (2019, 29-30) mengemukakan bahwa untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan terdapat tiga unsur penting, yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan
2. *Target group* atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dan perubahan serta peningkatan

3. Unsur pelaksana organisasi maupun perseorangan yang bertanggung- jawab dalam pengelolaan, implementasi dan pengawasan implementasi.

Syafiie (2010: 104) menyatakan kebijakan publik adalah sebuah jawaban terhadap suatu permasalahan karena berisikan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Maka, suatu kebijakan publik dapat menciptakan situasi dan dapat pula diciptakan oleh situasi. Menurut RC. Chandler dan JC. Plano yang dikutip oleh Syafiie (2010:105), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

(Leo Agustino dalam Raharja 2015:6) kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Pengertian tersebut dinilai sangat luas dan sulit untuk dipahami serta belum fokus pada subjek yang dikajinya karena lingkungan kebijakan publik sangat luas yaitu terdiri dari berbagai elemen- elemen di pemerintah.

Menurut Harbani (2020:106) Kebijakan adalah merupakan ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

2.4 Implementasi Kebijakan

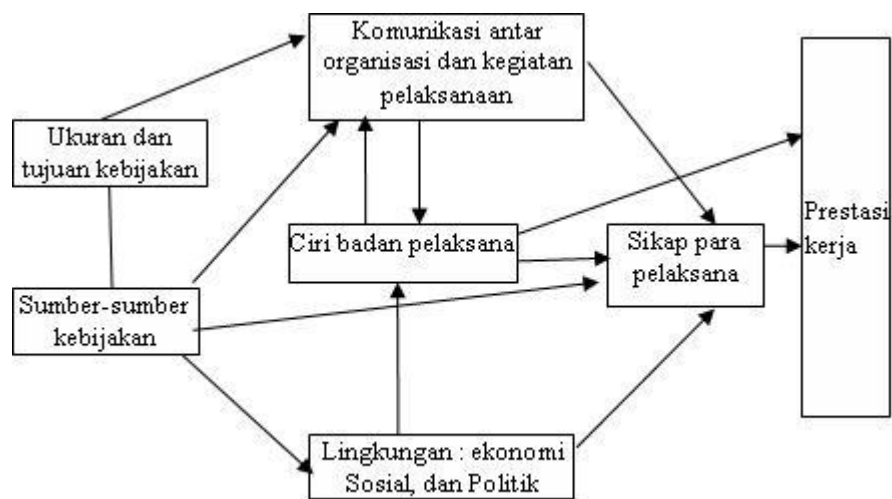
2.4.1 Model Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

Gambar 2.2

Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: <https://kertyawitaradya.files.wordpress.com/2010/04/model-van-horn.jpg>

1. Faktor Standar dan Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio - kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bias gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Faktor Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: ”New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.

3. Faktor Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Faktor Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses transferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency) (Van Mater dan Van Horn, dalam Widodo 1974). Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang

ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan - kepentingan organisasinya dan kepentingan - kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan

kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

2.4.2 Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

2.4.3 Definisi Kemiskinan

Pengertian kemiskinan umumnya selalu dikaitkan hanya dengan sektor ekonomi semata. Padahal kemiskinan bisa dilihat dari sisi sosial maupun budaya masyarakat. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002).

Dimensi Kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu :

- 1) Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian.
- 2) Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak

lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat.

- 3) Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan - kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya pembangunan yang ada. (Indra, kompas online, 2007).

2.4.4 Faktor Kemiskinan

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena Negara - negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan Negara - negara maju.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakikat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, di mana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
- 3) Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan

kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.

- 4) Kemiskinan konsekuensi. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

1.4.5. Kriteria Miskin Menurut Standar Badan Pusat Statistik

Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
 14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.

2.5 Kerangka Berpikir

Pembahasan akan dibahas mengenai Implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dengan menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat. Program tersebut termuat di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Sosial di masa pandemi Covid 19, khususnya di Kelurahan makasar Jakarta Timur. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan tidak meratanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan makasar Jakarta Timur.

Dengan adanya permasalahan di atas, dapat dianalisis melalui berbagai pandangan para ahli kebijakan publik difokuskan pada pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 178–214) sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran - sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber daya, dalam pelaksanaan sebuah penyaluran dana Bantuan Sosial perlu adanya para pelaksana untuk melaksanakan sebuah kebijakan, diantaranya:
 - a. Informasi, dalam pemberian sebuah informasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang dibuat supaya informasi yang diberikan kepada para pelaksana jelas dan detail tentang apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana harus melakukannya.
 - b. Staff, dengan staff salah satu tolak ukur sebuah keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, dengan adanya staff diharapkan dapat berhasil melakukan suatu pencapaian dari kebijakan. Banyak atau sedikitnya jumlah staff juga berdampak pada proses jalannya kebijakan, apalagi jika tugas dan fungsi yang diberikan terlalu panjang, dan tidak sulit dalam menjalankannya agar tidak menghambat jalannya kebijakan.
 - c. Wewenang, ini terkait pemberian tugas dari Peraturan Presiden tersebut kepada stakeholder terkait di Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Fasilitas, untuk menunjang keberhasilan program Bantuan Sosial ini fasilitas yang digunakan dapat terintegrasi secara merata, seperti dalam penyaluran Bantuan Sosial yang diberikan langsung kepada masyarakat yang terdampak Covid 19, yang di mana penyaluran Bantuan Sosial ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19.
3. Karakteristik Agen/Badan Pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik - karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang - ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
 - b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-untai dan proses-proses dalam badanbadan pelaksana.
 - c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
 - d. Vitalitas suatu organisasi.
 - e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
4. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) para pelaksana, Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Kemudian diidentifikasi dalam tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.
 5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospekt-prospekt tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, menurut Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor permasalahan dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.